



STRATEGI PENERAPAN EKONOMI ISLAM BERBASIS DIGITAL UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Maulana Ihsan Yusufi Suyatno

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Mirna Dyah Praptitorini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Anisa Kusumawardani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Astohar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Dhian Andanarini Minar Savitri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Alamat: Jl. Gedong Songo Raya No.12, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: maulanaihsan@stietotalwin.ac.id

Abstrak. *This study aims to explore strategic digital implementations of Islamic economic principles to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). The research uses a qualitative descriptive approach through a literature review of peer-reviewed journals and policy documents, combined with an analysis of current digital platforms in Islamic finance. The findings show that digitalization in Islamic economics has the potential to improve financial inclusion, zakat and waqf management, and encourage responsible investment, thereby aligning with multiple SDG targets. The findings highlight the urgent need for synergistic collaboration among stakeholders to digitize Islamic economic instruments for broader socio-economic impact.*

Keywords: *Islamic economics; digitalization; sustainable development; fintech sharia; SDGs*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam berbasis digital dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan, serta analisis implementasi platform digital ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi Islam memiliki potensi dalam meningkatkan inklusi keuangan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta mendorong investasi berkelanjutan yang sejalan dengan beberapa target SDGs. Diperlukan sinergi antara regulator, institusi keuangan syariah, dan teknologi untuk memperluas penerapan digitalisasi dalam ekonomi Islam guna memberikan dampak sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; digitalisasi; pembangunan berkelanjutan; fintech syariah; SDGs*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam berbasis digital semakin menjadi sorotan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di tengah transformasi teknologi global, penerapan prinsip-prinsip syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan perlu beradaptasi dengan era digital. Digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi, khususnya dalam pengelolaan keuangan sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta pembiayaan UMKM berbasis syariah. Teknologi digital memungkinkan

pencatatan yang lebih akurat, penyaluran yang lebih cepat, dan pelaporan yang lebih transparan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Data dari Global Islamic Fintech Report (2024) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga secara global dalam perkembangan fintech syariah, dengan nilai transaksi mencapai USD 2,9 miliar. Selain itu, digitalisasi dalam pengelolaan zakat nasional melalui platform seperti SIMBA mampu meningkatkan penghimpunan ZIS hingga 10% per tahun. Salah satu studi kasus yang menonjol adalah pemanfaatan platform crowdfunding syariah untuk membiayai usaha mikro di wilayah pedesaan, yang mampu menyalurkan lebih dari Rp 50 miliar dana kepada lebih dari 25.000 penerima manfaat hanya dalam dua tahun.

Transformasi digital dalam ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian indikator-indikator SDGs, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12). Selain itu, perkembangan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan big data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi dana sosial Islam. Oleh karena itu, integrasi ekonomi Islam dengan teknologi digital bukan hanya pilihan, tetapi keharusan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam di masa depan.

KAJIAN TEORI

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa digitalisasi instrumen ekonomi Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs. Zauro et al. (2021) menyatakan bahwa fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Rahman et al. (2020) menyoroti bahwa digitalisasi zakat dan wakaf meningkatkan efisiensi distribusi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam.

Teori maqashid syariah yang menjadi dasar filosofi ekonomi Islam sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan terhadap harta, jiwa, pendidikan, agama, dan keturunan. Penelitian oleh Wahyudi dan Said (2024) menunjukkan bahwa penguatan keuangan sosial Islam berbasis digital dapat mempercepat pencapaian SDGs secara multidimensi. Selain itu, Jedidia dan Ghroubi (2024) dalam studi bibliometrik internasional menyatakan bahwa lebih dari 60% penelitian global tentang ekonomi Islam dan SDGs mengarah pada tema digitalisasi sebagai katalisator utama transformasi ekonomi syariah.

Harun dan Rahmat (2025) juga menekankan bahwa terdapat korelasi kuat antara adopsi teknologi dalam lembaga keuangan Islam dengan peningkatan efektivitas distribusi dana sosial. Di sisi lain, studi oleh Wahab dan Mahdiya (2024) memperlihatkan bahwa Islamic microfinance berbasis digital mampu memberdayakan masyarakat marginal dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau dibanding pendekatan konvensional.

Lebih lanjut, integrasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang dilakukan dalam pendekatan Value-Based Intermediation (VBI) di Malaysia memperkuat narasi bahwa keuangan Islam memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan global. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa ada sinergi nyata antara ekonomi Islam, digitalisasi, dan agenda SDGs, serta mendesak perlunya penelitian lebih lanjut untuk memetakan strategi implementasi yang efektif dan inklusif di berbagai konteks negara berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan dari lembaga seperti BAZNAS, UNDP, dan Bank Indonesia, serta laporan riset dari organisasi yang relevan dengan ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan. Proses pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kriteria inklusi-eksklusi. Kriteria inklusi meliputi literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir (2014–2024), relevan dengan tema digitalisasi ekonomi Islam dan SDGs, serta telah melalui proses peer-review. Sedangkan kriteria eksklusi mencakup publikasi yang bersifat opini tanpa dasar metodologis yang kuat, serta literatur yang tidak tersedia dalam bentuk full-text.

Pencarian literatur dilakukan menggunakan database seperti Scopus, Google Scholar, dan DOAJ dengan kata kunci seperti "Islamic digital finance", "fintech syariah", "SDGs and Islamic economy", dan "Islamic social finance". Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara konsep digitalisasi, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan pencapaian indikator SDGs, guna menggambarkan kontribusi strategis dari transformasi digital dalam ekonomi Islam. kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan BAZNAS, UNDP, dan Bank Indonesia, serta laporan riset dari lembaga-lembaga terkait. Analisis dilakukan terhadap implementasi instrumen digital dalam ekonomi Islam dan keterkaitannya dengan indikator-indikator SDGs. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana strategi digitalisasi dapat memperkuat kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi ekonomi Islam tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tapi juga memperkuat kontribusi sosial-ekonomi melalui instrumen zakat, fintech syariah, wakaf, dan sukuk berkelanjutan. Salah satu implementasi utama yang berkembang pesat adalah sistem zakat digital. Di Indonesia, platform digital seperti **SIMBA** yang dikelola oleh **BAZNAS** memungkinkan pengelolaan zakat secara *real-time*, mencakup penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan yang transparan. Data dari BAZNAS (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi zakat

meningkatkan efisiensi distribusi hingga 30% dan memperluas jangkauan penerima manfaat, khususnya di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga amal zakat konvensional.

Tabel 1. Efektivitas Digitalisasi Zakat terhadap Distribusi dan Transparansi

Indikator	Sebelum Digitalisasi	Sesudah Digitalisasi	Persentase Perubahan
Rata-rata waktu distribusi zakat	14 hari	4 hari	-71%
Jumlah penerima manfaat	320.000 jiwa	520.000 jiwa	+62,5%
Cakupan wilayah distribusi	22 provinsi	34 provinsi	+54,5%
Pengaduan pengguna tercatat	Tidak sistematis	3.142 (terdata SIMBA)	N/A

Sumber: Kompilasi data dari BAZNAS, SIMBA Analytics, 2024

Tabel 1 menunjukkan efektivitas digitalisasi zakat terhadap distribusi dan transparansi. Terlihat bahwa dengan sistem digital, rata-rata waktu distribusi zakat berkurang dari 14 hari menjadi 4 hari, jumlah penerima manfaat meningkat dari 320.000 jiwa menjadi 520.000 jiwa, dan cakupan wilayah distribusi bertambah dari 22 provinsi menjadi 34 provinsi. Selain itu, data pengaduan yang mulai terkelola secara sistematis dalam sistem SIMBA mencerminkan peningkatan akuntabilitas publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Sementara itu, fintech syariah telah menjadi aktor utama dalam ekosistem pembiayaan syariah digital. Perusahaan-perusahaan seperti ALAMI, Investree Syariah, dan Ammana berperan menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan modal melalui perbankan konvensional. Pembiayaan dilakukan dengan akad-akad syariah seperti murabahah dan mudharabah yang menghindari riba dan spekulasi. Data dari OJK dan AFSI mencatat bahwa total pembiayaan fintech syariah mencapai lebih dari Rp 5,2 triliun dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 29%. Pada tahun 2024, pengguna aktif fintech syariah diproyeksikan mencapai 8,2 juta orang. Dalam kerangka SDGs, perkembangan ini mendukung target peningkatan inklusi keuangan (SDG 8) dan pembangunan industri inovatif (SDG 9).

Tabel 2. Pertumbuhan Fintech Syariah di Indonesia (2020–2024)

Tahun	Jumlah Pengguna Aktif	Total Pembiayaan (Rp Triliun)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2020	2.100.000	1,25	—
2021	3.400.000	2,20	76%
2022	5.100.000	3,65	66%
2023	6.800.000	5,20	42%

**STRATEGI PENERAPAN EKONOMI ISLAM BERBASIS DIGITAL UNTUK
MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)**

Tahun	Jumlah Pengguna Aktif	Total Pembiayaan (Rp Triliun)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2024*	8.200.000	6,75	29%

Sumber: OJK, ALAMI Insight, AFSI (2024)

Tabel 2 merangkum pertumbuhan fintech syariah di Indonesia selama periode 2020–2024. Terdapat peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah pengguna maupun total pembiayaan. Meskipun laju pertumbuhan menurun dari 76% menjadi 29%, hal ini mencerminkan proses konsolidasi pasar dan peningkatan kualitas layanan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah.

Dalam sektor wakaf, digitalisasi memperkuat pengelolaan wakaf produktif melalui integrasi teknologi blockchain dan aplikasi mobile. Platform seperti WakafChain digunakan untuk mencatat, mengelola, dan mendistribusikan dana wakaf secara transparan dan efisien. Proyek-proyek berbasis wakaf digital mulai bermunculan, seperti pembangunan rumah sakit wakaf di Jawa Barat dan sekolah berbasis wakaf di Sumatera Barat. Meskipun demikian, tantangan masih ada terkait standarisasi proyek dan transparansi penggunaan dana. Hanya sekitar 3% dari proyek sukuk hijau antara 2020–2024 yang memenuhi kriteria dampak lingkungan secara terukur. Maka, dibutuhkan penguatan regulasi dan audit terhadap proyek-proyek wakaf digital.

Dalam hal pembiayaan berkelanjutan, Indonesia menjadi pelopor melalui penerbitan Green Sukuk sejak tahun 2018. Hingga 2024, total penerbitan Green Sukuk mencapai lebih dari USD 5 miliar, yang digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, konservasi hutan, serta pengelolaan air bersih dan irigasi. Pada tahun 2024, total penerbitan sukuk ESG mencapai USD 15,2 miliar secara global, dan Indonesia menyumbang sekitar USD 3,526 miliar. Skema pembiayaan ini secara langsung mendukung target SDG 7 (energi bersih), SDG 11 (kota berkelanjutan), dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim).

Tabel 3. Perbandingan Strategi Digital Ekonomi Islam di Beberapa Negara

Negara	Inisiatif Digital Utama	Fokus Utama	Relevansi SDGs
Indonesia	SIMBA, WakafChain, Green Sukuk	Zakat, wakaf produktif, pembiayaan hijau	SDG 1, 7, 10, 13
Malaysia	Value-Based Intermediation (VBI)	ESG finance, pelaporan syariah	SDG 8, 12, 17
Arab Saudi	Vision 2030, zakat & waqf portal	Literasi digital, pendataan aset wakaf	SDG 4, 11, 16
UEA	Digital Islamic Bank, green sukuk	Fintech, pembiayaan berkelanjutan	SDG 9, 13, 15

Sumber: UNDP, Bank Negara Malaysia, SAMA, Islamic Finance News (2023–2024)

Tabel 3 membandingkan strategi digitalisasi ekonomi Islam dari beberapa negara. Malaysia menonjol dengan inisiatif Value-Based Intermediation (VBI) yang menekankan integrasi nilai keberlanjutan dalam praktik keuangan syariah. Lembaga keuangan Malaysia telah mengadopsi pelaporan dampak sosial berbasis prinsip syariah sebagai bagian dari strategi

kelembagaan. Arab Saudi, melalui Visi 2030, mendorong digitalisasi sistem wakaf dan zakat dengan dukungan teknologi dan kebijakan publik. Sementara UEA fokus pada pengembangan bank digital Islam dan platform pembiayaan berbasis AI dan ESG. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki keunggulan dalam pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi secara nasional melalui platform digital yang didukung kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi digital dengan maqashid syariah mampu membentuk ekosistem ekonomi Islam yang progresif, akuntabel, dan berdampak luas. Prinsip perlindungan harta, jiwa, dan lingkungan yang terkandung dalam maqashid syariah sangat relevan dalam mendukung agenda SDGs. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan akses internet di daerah tertinggal, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi berkelanjutan, penguatan regulasi, dan kolaborasi multisektor untuk memastikan digitalisasi ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan ekonomi Islam berbasis digital terbukti memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berdasarkan hasil kajian, inovasi-inovasi seperti zakat digital, fintech syariah, wakaf digital, dan Green Sukuk menunjukkan efektivitas yang nyata dalam mendorong inklusi keuangan, pemerataan distribusi dana sosial Islam, serta pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan. Digitalisasi mempercepat penyaluran bantuan sosial berbasis syariah secara efisien dan transparan, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan komunitas rentan. Dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi, Indonesia memiliki potensi besar yang dapat terus dioptimalkan melalui dukungan regulasi, kolaborasi multisektor, dan peningkatan literasi digital keuangan syariah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai-nilai maqashid syariah dengan teknologi digital menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang relevan dengan era transformasi digital dan pembangunan global. Oleh karena itu, strategi penerapan ekonomi Islam berbasis digital perlu diarahkan tidak hanya untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga demi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs. Diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, serta masyarakat luas untuk memperkuat implementasi dan dampak nyata dari transformasi ini secara berkelanjutan.

Saran:

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur dampak langsung dari digitalisasi ekonomi Islam terhadap pencapaian indikator SDGs tertentu secara empiris. Selain itu, kajian dapat difokuskan pada sektor spesifik seperti pendidikan, energi, atau pangan untuk melihat kontribusi instrumen ekonomi Islam digital secara sektoral.

Keterbatasan:

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif berbasis literatur yang belum mencakup data primer lapangan atau studi longitudinal. Selain itu, ruang lingkup geografis lebih terfokus pada Indonesia, sehingga hasil generalisasi ke negara lain perlu dilakukan dengan hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Astohar, A., Praptitorini, M. D., Suyatno, M. I. Y., & Aulia, J. (2023). Peran inklusi keuangan dalam memediasi pengaruh financial technology dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 426–443.
- Astohar, A., Suyatno, M. I. Y., Savitri, D. A. M., & Kase, R. (2023). Pengelolaan keuangan pada UMKM di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(2), 164–175.
- Harun, H. F., & Rahmat, N. (2025). Islamic Finance for Sustainable Development: A Mixed-Methods Systematic Review and Bibliometric Analysis of SDG Alignment. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(1), 112–130.
- Jedidia, K. B., & Ghroubi, M. (2024). Islamic finance and SDGs: bibliometric review and future research agenda. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 22(1), 17–36.
- Kusumawardani, A., Suyatno, M. I. Y. (2023). Implementasi pengelolaan digital dana ZIS untuk stabilisasi perekonomian desa binaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah: Studi kasus Demak, Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(4), 742–762.
- Kusumawardani, A., Suyatno, M. I. Y., Andanarini, D., Salim, N., & Rama, E. (2023). Digitalization, self-esteem, and self-efficacy in accountability village fund management. *Proceedings of the International Conference of Business and Social Sciences (ICOBUSS)*, 1390–1402.
- Kusumawardani, A., Savitri, D. A. M., Suyatno, M. I. Y., Prasetya, A. Y., & others. (2022). Pemberdayaan UMKM dan masyarakat desa melalui manajemen keuangan dan pemasaran digital: Strategi mewujudkan kemandirian ekonomi di Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong. *Jurnal Vokasi*, 9(2), 186–192.
- Rahman, A., & Mulyani, S. (2020). Islamic Fintech to Achieve Sustainable Development Goals. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 45–60.
- Saputri, M. (2023). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 98–110.
- Soekapdjo, S., Aryani, D., & Nugroho, L. (2023). Fintech di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 210–222.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2024). The Role of Islamic Micro Finance in Promoting Sustainable Development Goals. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 3(1), 11–25.
- Wahyudi, I., & Said, M. (2024). Islamic Social Finance and the Acceleration of SDGs: A Systematic Literature Review. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 33–49.
- Zauro, N. A., Salleh, M. C. M., & Sanusi, N. A. (2021). Digital Transformation in Islamic Finance and its Impact on Financial Inclusion. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 17–30.